

PENGARUH *FEMININITAS* PEREMPUAN DALAM NEGOSIASI KONFLIK

Anastazia Niatry Wattimena¹, Grace F. Irene Hutabarat²

Prodi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

anastazianw@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 membahas tentang potensi perempuan untuk menjadi negosiator ulung mengingat resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 yang memberikan peluang bagi perempuan untuk aktif berkontribusi dalam penciptaan dan pemeliharaan perdamaian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan penggunaan data sekunder yaitu studi literatur. Teori atau perspektif yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di atas adalah perspektif feminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dalam negosiasi cenderung agresif dan kompetitif hal ini dilatarbelakangi oleh sifat bawaan dari laki-laki sendiri yang secara alami muncul. Lain halnya dengan perempuan yang memiliki *maternal insting*, insting ini tumbuh tidak lain karena pengalaman perempuan saat menjadi seorang ibu, dan anak perempuan yang mencontoh perilaku ibunya. Sisi emosional perempuan yang kuat menjadikan mereka sebagai aktor negosiasi yang kooperatif dan cinta damai dibandingkan dengan laki-laki.

Kata Kunci : Negosiasi, maternal insting, agresif

PENDAHULUAN

Menurut studi yang dilakukan di Universitas Harvard tentang kesenjangan gender di 174 negara di dunia menemukan bahwa Negara dengan kesenjangan gender paling tinggi adalah Negara yang paling rawan mengalami perang baik perang domestik/perang dengan Negara tetangga (Strasse, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang cukup signifikan baik dalam negosiasi konflik maupun rekonsiliasi dan pembangunan pasca konflik. Namun meskipun peran perempuan sangat esensial dalam negosiasi damai, sepanjang tahun 1992-2011 jumlah perempuan yang menjadi mediator hanya mencapai 2%, dan yang menjadi negosiator hanya berkisar 9% (O'Reilly, 2016). Padahal perempuan merupakan agen perdamaian yang ulung karena memiliki karakteristik bawaan yang lebih merepresentasikan perdamaian daripada laki-laki (Azizah, 2017).

Di antara 9% perempuan yang berhasil menduduki peran sebagai negosiator, salah satunya adalah Maria Emma. Pemerintah Kolumbia dalam konfliknya melawan kelompok tentara pemberontak *Columbian Revolutionary Armed Forces (FARC-EP)*, menunjuk Maria Emma Mejia sebagai salah satu negosiator yang mewakili pemerintah dalam negosiasi perdamaian sepanjang tahun 1998-2002 (Bouvier, 2016). Keterlibatan perempuan dalam proses negosiasi damai makin marak di upayakan menyusul resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tahun 2000 yang secara umum menyuarakan betapa pentingnya peran perempuan dalam membangun perdamaian dan keamanan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB didasarkan pada dua asumsi besar yakni bahwa perang telah memberikan dampak dan pengaruh yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Kedua, perempuan memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya Negara pasca perang (Tucker, 2017). Oleh sebab itu, DK PBB menganggap perempuan juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan menyangkut perdamaian.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana menurut catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang Konflik Sosial di Poso sepanjang tahun 1998-2005 (Ocktaviana, 2014), perempuan-perempuan Poso yang terjebak berani memasuki zona-zona berbahaya menuju sarana-sarana kesehatan, dan gudang-gudang penyimpanan makanan agar keluarganya dapat bertahan hidup. Tidak hanya itu aktifitas perempuan Poso pun ikut terjun langsung dan memasuki wilayah-wilayah konflik untuk menguatkan penduduk dan mengumpulkan informasi seputar konflik. Perempuan merupakan aktor yang lebih mudah diterima kehadirannya di tengah-tengah dua kelompok yang berseteru, oleh sebab itu perempuan memiliki potensi untuk menjadi agen perdamaian dan negosiator yang ulung.

Penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji potensi perempuan saat harus menjadi negosiator dalam penyelesaian konflik dan perang karena penulis percaya perempuan memiliki karakteristik yang memungkinkannya menjadi negosiator yang handal dalam mencari pemecahan pada kasus-kasus perang dan konflik.

Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Swanee Hunt dan Cristina Posa (2001) yang berjudul *Woman Waging Peace* (Hunt, Posa, 2001), mereka menjelaskan perlunya kehadiran perempuan dalam meja perundingan perang. Penelitian ini menggunakan

konsep *inclusive security* yang menekankan keterlibatan kelompok lokal dalam usaha untuk mencapai perdamaian, dalam hal ini adalah keterlibatan perempuan. Perempuan memiliki peranan yang penting dalam *inclusive insecurity* karena perempuan lebih banyak aktif dalam gerakan-gerakan LSM / NGO yang membela hak-hak masyarakat, perempuan juga terlibat dalam gerakan protes dan referendum yang berguna untuk *society empowerment*. Jadi penelitian ini menitikberatkan pada keterlibatan perempuan dalam proses perundingan konflik karena perempuan merupakan aktor lokal yang memiliki pengalaman mumpuni dalam *society empowerment* sehingga dapat berkontribusi dalam negosiasi.

Jurnal kedua berjudul *Women, Peace, and Security in Contemporary Pakistan : Meeting the Challenge of Security Council Resolution 1325 ?* yang ditulis oleh Siobhan Mullaly. Artikel ini membahas mengenai posisi perempuan di Pakistan dan peran kelompok militan religius untuk menghambat proses transisi demokrasi. Artikel ini berfokus pada potensi dan resiko dari kegagalan Pakistan dalam menyelesaikan persamaan gender sepanjang sejarah konstitusionalnya bahkan setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 telah disahkan dan diratifikasi.

Artikel Jurnal yang ke tiga berjudul *Gender, Participation, and Post-Conflict Planning in Northern Srilanka* yang ditulis oleh Simon Harris (2004). Artikel ini membahas tantangan yang selalu dihadapi perempuan dalam perannya saat proses rekonsiliasi pasca konflik. Artikel fokus pada dua tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam kaitannya dengan proses rekonsiliasi pasca konflik. Ada dua tantangan yang dihadapi yakni, perlunya institusi dalam Negara untuk mengangkat isu persamaan gender dalam proses penciptaan perdamaian. Kedua, partisipasi perempuan dalam lembaga dana institusi di atas perlu didorong dan didukung melalui pembangunan kapasitas. Artikel ini mengulas dua strategi yang akan diterapkan di Srilanka guna menghadapi tantangan dimaksud.

Jurnal keempat ditulis oleh Siantari Rihartono yang berjudul *Memposisikan Kembali Kuasa Perempuan dalam Perdamaian Hubungan Antar Agama (Kasus Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, 2013)*. Jurnal ini membahas pentingnya peran perempuan dalam rekonsiliasi konflik dan pembangunan perdamaian dalam konflik sosial antar agama. Jurnal ini terfokus dalam tiga hal yakni, potret kehidupann perempuan agamis, strategi perempuan untuk menjaga perdamaian, dan bagaimana kekuatan perempuan untuk membangun perdamaian terbentuk.

Dalam buku *Gender dan Politik* oleh Nur Azizah (2017), juga dijelaskan bahwa perempuan cenderung memiliki kemampuan dalam menciptakan perdamaian karena pada dasarnya perempuan memiliki kemampuan biologis untuk melahirkan yang mana melahirkan dipersepsikan sebagai menciptakan kehidupan. Perang merupakan penghancuran kehidupan, oleh sebab itu perang cenderung merepresentasikan laki-laki sedangkan penghentian perang dan damai direpresentasikan oleh perempuan karena damai berarti hidup. Lebih jauh jika ditinjau dari fakta sejarah, perempuan telah melakukan protes terhadap kebijakan perang sejak PD I, perang merupakan buah dari pemikiran laki-laki karena laki-laki merupakan makhluk agresif dan ambisius. Perang sangat bertolak belakang dengan sikap perempuan yang cenderung penuh kasih sayang dan mencintai perdamaian.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai *Mengapa Perempuan berpotensi menjadi negosiator yang handal dalam Negosiasi Konflik Sosial atau Perang antar Negara*. Penulis akan menggunakan perspektif *Feminisme*.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Perang dan Konflik pada Perempuan

Johan Galtung dalam bukunya *Transcend and Transformation* (2004) menjelaskan jika setiap individu memiliki tujuan yang berbeda, perbedaan tujuan antar individu yang menciptakan kontradiksi yang selanjutnya berujung pada konflik (Galtung, 2004). Jadi konflik merupakan pertentangan yang tercipta antara dua individu atau lebih, dan cara mengatasi konflik tersebut adalah dengan negosiasi. Konflik termanifestasi dalam beragam wujud salah satunya adalah dengan penggunaan kekerasan yang masif dan terlegitimasi, kita sebut sebagai perang. Perang dapat berupa perang antar suku, antar agama, antar etnis, dan antar Negara, satu hal yang pasti terjadi dalam perang yakni jatuhnya korban sipil baik anak-anak maupun perempuan.

Perempuan menjadi target yang mudah saat perang terjadi, pada umumnya menjadi korban pelecehan seksual, dibunuh, dsb. Menurut laporan yang dirilis oleh *American Journal of Public Health* di bulan Juni (Adetunji, 2011), sebanyak 48 perempuan diperkosa setiap jamnya. Republik Kongo merupakan salah satu Negara di Afrika dengan masa konflik sipil sepanjang 15 tahun. PBB menyebut Kongo sebagai salah satu Negara yang menggunakan tindakan pemerkosaan sebagai salah satu senjata untuk memenangkan perang. Jadi eksploitasi terhadap perempuan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kepentingan.

Kekerasan yang menimpa perempuan dalam masa-masa perang merupakan warisan leluhur yang berumur sama tuanya dengan umur perang sendiri. Kekerasan seksual seperti pemerkosaan merupakan tindakan yang ilegal dan hanya dilakukan oleh tentara yang tidak disiplin namun telah dicontohkan berabad-abad yang lalu salah satunya oleh tentara Maroko dalam perang sipil dengan Spanyol (The Economist, 2011).

Tabel. 1
Jumlah Pemerkosaan pada Perang Abad 19an

Konflik	Jumlah Kasus Pemerkosaan
Perang Sino-Jepang II, Nanking, 1937	20.000 (sebagai budak seks yang diambil tentara Jepang)
Tentara Uni Soviet dalam Perang Jerman, PD II	100.000-2.000.000
Tentara Pakistan dalam Perang Bangladesh, 1971	200.000
Perang Bosnia, 1992-1995	20.000
Perang Sipil Sierra Leone, 1991-2002	Lebih dari 50.000
Genosida Rwanda, 1994	500.000

Sumber : The Economist (2011)

Tabel di atas menunjukkan sepanjang perang berlangsung, perempuan menerima dampak negatif paling banyak dari perang. Tindakan pemerkosaan seringkali dilakukan atas dasar perintah dari komandan pasukan untuk menciptakan ketakutan di hati musuh sehingga akhirnya meninggalkan wilayah yang disengketakan misalnya tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Serbia yang merupakan perintah dari pimpinan. Tindakan tersebut dilakukan agar warga muslim Bosnia meninggalkan wilayah yang disengketakan dengan Serbia. Para wanita muslim Bosnia dibawa ke *rape camp* dan kemudian diperkosa secara bergantian.

Penderitaan yang dialami perempuan tidak hanya berdampak saat itu namun

berdampak pada masa depan perempuan. Penyakit kelamin, kehamilan tak diinginkan, trauma psikologi berkepanjangan, bahkan kehilangan nyawa, itu semua menjadi dampak jangka panjang atas pemerkosaan yang dialami perempuan sepanjang konflik terjadi. Dampak yang terlalu besar yang ditanggung kaum perempuan, membuat mereka wajib diikutsertakan dalam proses-proses penghentian perang dan penciptaan perdamaian, karena merekalah yang menanggung dampak paling berat dari konflik dan perang yang terjadi di mana keputusan untuk berperang paling banyak diambil oleh laki-laki.

Posisi Perempuan dalam Isu Perdamaian

Boutros Boutros Galhi mendefinisikan proses *peace building* sebagai sebuah konstruksi lingkungan baru *new environment* (disampaikan dalam sidang umum PBB tahun 1993) (Women in Conflict and Peace, 2011) yang berarti *peace building* tidak hanya tentang perdamaian, namun proses mempertahankan perdamaian setelah perjanjian damai disepakati mengingat dalam lima tahun pertama setelah sebuah Negara mengalami perang sipil, ada 50 % kemungkinan untuk kembali mengulang perang yang sama. 5 tahun kerentanan itulah yang membuat proses memelihara perdamaian sama pentingnya dengan menciptakan perdamaian. Sayangnya, konsep *new environment* dari Boutros Boutros Galhi ini hanya berfokus pada keterlibatan laki-laki saja, hal ini dianggap sebagai ketidakadilan mengingat dalam perang perempuan juga memiliki andil yang besar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Democracy and Electoral Assistance* di wilayah Afghanistan pasca invasi militer Amerika Serikat ditemukan bahwa, peran perempuan dalam isu-isu perdamaian pasca invasi AS dapat dibagi ke dalam dua kategori utama yakni, keterlibatan informal perempuan dalam proses perdamaian di level lokal. Kedua, keterlibatan perempuan dalam kelompok misi perdamaian pemerintah yang bertugas untuk menegosiasikan kesepakatan damai pemerintah dengan kelompok Taliban (Women in Peace and Conflict, 2011). Sayangnya frekuensi keterlibatan perempuan-perempuan di Afghanistan dalam skala lokal ditentukan juga oleh etnis mereka, misalnya perempuan beretnis Hazara yang menganut Islam Syiah jauh lebih aktif terlibat dibandingkan dengan perempuan perempuan etnis Pashtun yang beraliran Sunni. Hal ini disebabkan adanya perbedaan interpretasi antara Sunni dan Syiah mengenai hukum Syariah yang berlaku di Afghanistan. Intinya adalah, setiap perempuan memiliki potensi menjadi bagian yang signifikan dalam proses pembangunan perdamaian.

Potensi positif yang dimiliki perempuan ini sayangnyanya tidak diapresiasi dengan baik di beberapa budaya, misalnya di Afghanistan jika seorang anak laki-laki terluka di jalan karena membela sesuatu maka dia akan dianggap pahlawan. Hal yang berbeda terjadi jika yang terluka adalah anak perempuan, kejadian tersebut justru akan membuat keluarganya malu dan dipandang rendah. Kenyataan inilah yang kadang membuat perempuan berpikir dua kali untuk berperan aktif dalam aktifitas penciptaan perdamaian.

Perempuan dan Negosiasi dalam Perspektif Feminisme

Feminisme secara umum merupakan rangkaian pemikiran yang secara eksplisit mengakui perempuan yang tersubordinasi oleh laki-laki. Feminisme menyadari betul pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi dari masyarakat dan tidak bersifat alami / bawaan. Feminisme merupakan konsep yang percaya bahwa suara perempuan berharga dan suara perempuan harus diwakili oleh

perempuan juga (Azizah, 2017). Perempuan harus ikut mengambil bagian pada aspek-aspek yang dampaknya secara langsung melibatkan kaum perempuan, misalnya dalam konteks penyelesaian konflik atau perang. Perempuan secara langsung menerima efek buruk dari konflik jadi sudah sewajarnya jika perempuan juga ikut dilibatkan sebagai aktor-aktor penting yang secara resmi turut serta dalam inisiasi perdamaian dan negosiasi damai serta berkontribusi langsung dalam aktifitas-aktifitas mempertahankan dan menjaga perdamaian.

Keyakinan bahwa keterlibatan perempuan dalam negosiasi konflik akan membawa dampak berbeda yang lebih positif diyakini karena pertama, secara alami perempuan memang memiliki sifat bawaan yang damai dan mencintai kedamaian. Kedua, perempuan telah melewati proses pembangunan karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan laki-laki. Karakter biologis laki-laki membuat mereka cenderung bersifat lebih agresif, dan berambisi untuk mendominasi pihak lain. Karakter tersebut merupakan dua karakter yang merepresentasikan perang. Tidak hanya itu, kecenderungan untuk memperkosa dan menaklukan perempuan berasal dari karakteristik biologis laki-laki atas perempuan (Palmer, 2008). Faktanya tindakan pemerkosaan sering dijadikan salah satu senjata untuk melumpuhkan lawan dalam situasi perang.

Laki-laki menemukan bahwa, alat kelaminnya dapat digunakan sebagai senjata, alat untuk menciptakan ketakutan dan teror demi memperoleh kuasa dan dominasi atas sesuatu. Sedangkan perempuan cenderung memilih bertahan di bawah perlindungan pihak yang berhasil menguasai mereka (laki-laki) agar tidak dikuasai oleh laki-laki lain. Keagresifitasan laki-laki dapat dilihat dari sifat mereka yang cenderung berkompetisi dan bertarung antar sesama laki-laki dalam hal kepemilikan properti. Kecenderungan karakter seperti ini mendekatkan laki-laki pada opsi-opsi berperang dibandingkan dengan opsi damai.

Namun sejauh ini belum ada, bukti yang signifikan bahwa struktur anatomi dan struktur genetika laki-laki menjadi faktor utama laki-laki memiliki kecenderungan perang hanya saja kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki mendorong mereka untuk memilih berperang jika dibandingkan dengan perempuan yang akan berpikir berulang-ulang sebelum memutuskan untuk berperang mengingat kekuatan fisik perempuan yang terbatas. Hal ini dianggap sebagai sebagian alasan mengapa dalam negosiasi, bagi perempuan kemungkinan perang akan mutlak dihindari dan perempuan cenderung giat dalam memelihara perdamaian dibandingkan dengan laki-laki karena keengganan untuk berperang.

Sebagian ahli berpendapat perbedaan fungsi gender di atas dipengaruhi oleh pengalaman pertumbuhan di usia anak-anak di mana perkembangan karakter anak mulai terbentuk (Palmer, 2008). Anak perempuan akan mengambil contoh bagaimana seharusnya bersikap, sifat dan peran dengan berkaca pada ibunya. Sebaliknya, bagi anak laki-laki menjadi karakter yang tangguh dan bertanggungjawab, adalah bawaan dari sifat dan karakter ayah yang memberikan contoh sebagai seorang pemimpin yang kuat bagi keluarga.

Maternal thinking yang dimiliki seorang individu sangat merefleksikan perdamaian dan resolusi konflik. Beruntungnya, *maternal thinking* lebih menonjol pada perempuan yang melahirkan kehidupan baru (anak), kemudian mengasuhnya, sehingga memiliki keterikatan emosional yang mendalam antara ibu dan anak. Hal ini meskipun ada pada sebagian laki-laki karena laki-laki juga berperan sebagai ayah yang mengasuh anak namun tidak pernah sedominan *maternal thinking* yang dimiliki perempuan, ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh perempuan yang mengandung seorang anak selama 9

bulan, dan kemudian menyusui hingga beberapa tahun menjadikan *maternal instinct* perempuan lebih kuat dengan kedekatan emosional yang mendalam. Insting ini menurunkan keagresifitasan seorang individu, oleh sebab itu perempuan cenderung tidak agresif jika berkaitan dengan opsi penggunaan kekerasan.

Selanjutnya, perempuan yang feminis dan mengerti akan nilai-nilai feminisme cenderung kritis dan lebih ingin melibatkan diri dalam proses penciptaan perdamaian karena kelompok perempuan ini lebih paranoit akan konflik. Kelompok oposisi perempuan dalam parlemen Amerika di tahun 1980 mengkritisi anggaran belanja militer Amerika, dengan alasan bahwa akan lebih baik apabila anggaran dialokasikan pada isu-isu sosial. Feminisme menekankan pada kesetaraan dan keadilan, tanpa memperhatikan isu-isu yang bersifat hirarki dan usaha dominasi atas Negara / aktor lain.

Pada dasarnya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi gaya negosiasi setiap orang, di antaranya karakter/sifat/personality, budaya,, dan gender. Dalam model negosiasi, perempuan dianggap lebih kooperatif sedangkan laki-laki lebih kompetitif. Menurut Wyatt (1999) perempuan bernegosiasi dengan berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak sedangkan laki-laki bernegosiasi untuk menang (Dobrijevic, 2014). Menurut Lewicki, et al (2010), ada 5 perbedaan dalam model negosiasi berdasarkan gender, yakni:

1. Dalam konteks negosiasi, perempuan lebih fokus pada hubungan sedangkan laki-laki pada tugas
2. Perempuan dan laki-laki memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Laki fokus pada posisi, sedangkan perempuan terfokus pada informasi personal / pribadi dan emosi
3. Ada sebagian fakta lapangan yang membuktikan bahwa perempuan sering diperlakukan lebih buruk dibandingkan laki-laki dalam negosiasi
4. Penggunaan taktik yang sama sering berujung pada hasil yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menggunakan taktik pertukaran sering tidak sukses laki-laki
5. Stereotip terhadap gender akan mempengaruhi performa negosiator dalam negosiasi. Umumnya, negosiator akan berlaku sesuai dengan stereotip yang mereka percayai.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kray, et al (2007) perempuan dalam negosiasi lebih asertif dan menetapkan ekspektasi yang tinggi terhadap tingkat kesuksesan negosiasi tersebut. Dua karakter inilah yang disinyalir paling mempengaruhi jalannya negosiasi, bagi laki-laki *persistence* (bertahan) merupakan keunggulan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan dengan segala keterbatasan yang dikonstruksikan agar melekat pada mereka ternyata memiliki potensi yang luar biasa, salah satunya adalah menjadi negosiator dalam konflik-konflik sosial atau konflik antar Negara. Sisi emosional perempuan yang sering dipandang sebagai sisi lemah sesungguhnya dapat menjadi potensi yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah negosiasi damai. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama berbakat dalam negosiasi sesuai dengan karakteristik gender masing-masing, laki-laki dengan kemaskulinannya sedangkan perempuan dengan kefemininannya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 yang memberikan legitimasi bagi perempuan untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi konflik dan negosiasi damai membuat Negara-negara di dunia mengadaptasi peraturannya dan mulai memberikan kesempatan bagi perempuan meskipun pertumbuhan partisipasi perempuan tidak langsung menunjukkan nilai yang signifikan. Partisipasi perempuan ini juga sejalan dengan pertumbuhan doktrin feminisme yang muncul dan berkembang setelah PD II. Doktrin feminisme yang secara umum mengajak perempuan untuk turut aktif baik dalam politik maupun aspek-aspek lain selain pada ranah domestik (rumah dan keluarga) seharusnya menjadi tambahan alasan dan motivasi bagi kaum perempuan untuk mengeksplorasi potensi dan kemampuannya untuk mengambil bagian dari penciptaan dan penjagaan perdamaian.

REFERENSI

Buku :

Johan Galtung, 2004, *Transcend and Transformation*, Pluto Press : London
 Nur Azizah, 2017, *Gender dan Politik* , The Phinisi Press : Yogyakarta

Jurnal :

Gordana Dobrijevic, *The Effect of Gender on Negotiation Behavior*, Singidunum Journal of Applied Science Vo. 11 (1), tahun 2014, dalam <http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-8090/2014/2217-80901401043D.pdf>

Octaviana, Santoso, Purwoko, Peran-Peran Perempuan di Wilayah Konflik : Antara Korban Penyintas, dan Agen Perdamaian, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 16 (3), tahun 2014, dalam <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/40/23>

Simon Harris, *Gender, Participation, and Post Conflict Planning in Northern Srilanka*, *Gender and Development* Vol. 12 (3) 2004, p. 60-69

Siantari Rihartono, Memosisikan Kembali Kuasa Perempuan dalam Perdamaian Hubungan antar Agama (Kasus Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, Vol. 6 (2) tahun 2013, dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5s5Gw9-LYAhUBu48KHbAsA7cQFghHMAU&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-suka.ac.id%2Fisoshum%2Fprofetik%2Farticle%2Fdownload%2F1169%2F1079&usg=AOvVaw3fX6HvELFz14Sm9-YQ9nU6>

E-Paper :

Virginia M Bouvier, *Gender and the Role of Women in Colombia's Peace Process*, UN Women Background Paper, 4 Maret 2016, United States Institute for Peace, dalam <https://www.usip.org/sites/default/files/Gender-and-the-Role-of-Women-in-Colombia-s-Peace-Process-English.pdf>

Swanee Hunt, Cristina Posa, *Women Waging Peace*, *Foreign Policy* No. 124 (May-June 2001), p. 38-47

Website :

Woman and Peace : A Special Role in Violent Conflict, dalam <https://www.usip.org/publications/2016/03/women-and-peace-special-role-violent-conflict>

Marie O' Reilly, *Why Women ? Inclusive Security and Peaceful Societies*, Oktober 2015, diakses pada 17 Januari 2018 11.35 wib, dalam

<https://www.inclusivesecurity.org/publication/why-women-inclusive-security-and-peaceful-societies/>

Joshua Tucker, *How Do Women Affect Conflict, Peace, and Security ? That's Depends Exactly on What You're Asking*, The Washington Post 29 September 2017, dalam

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/09/29/how-do-women-affect-conflict-peace-and-security-the-answer-depends-on-exactly-what-youre-asking/?utm_term=.dd6efbdf57e2

Jo Adetunji, *Forty-Eight Women Raped Every Hour in Congo : Study Finds*, The Guardian Edisi 12 Mei 2011, dalam

<https://www.theguardian.com/world/2011/may/12/48-women-raped-hour>

<http://www.economist.com/node/17900482> s